

PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA (STUDI KASUS UED-SP DHARMA BAKTI DESA GABUNG MAKMUR KABUPATEN SIAK)

Oleh:

Million Lumban Gaol

Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Panam Km 12.5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293,
Telp/Fax (0761)63277

Program Pemberdayaan Desa merupakan program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan penyediaan UED-SP terhadap pemanfaat/ masyarakat desa yang melakukan pinjaman untuk usaha, dan pemberdayaan pada kapasitas kelembagaan desa UED-SP. untuk mewujudkan pembangunan masyarakat desa yang partisipatif dan mandiri. Subtansi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan UED-SP Dharma Bakti dan lembaga tersebut dalam mendorong keberdayaan pada usaha ekonomi masyarakat desa.

Konsep teori yang peneliti gunakan adalah keberdayaan ekonomi produktif dan keberdayaan kapasitas kelembagaan UED-SP Dharma Bakti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan instrument pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan data dokumen UED-SP Dharma Bakti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah adanya program pemberdayaan melalui penguliran dana UED-SP Dharma Bakti, keberdayaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan meningkat. Pada pengembalian dana pinjaman masih mengalami tunggakan atau kemacetan dikarenakan kurangnya pelatihan dan pendampingan terhadap penggunaan dana pinjaman UED-SP Dharma Bakti. Selain itu, faktor sosial ekonomi pemanfaat yang mayoritas adalah petani, umumnya sawit, harga Tandan Buah Sawit (TBS) yang fluaktif dan kondisi sosial lainnya ikut memberi pengaruh terhadap perkembangan usaha ekonomi pemanfaat dan lembaga UED-SP Dharma Bakti.

Kata Kunci : Kemiskinan, Pemberdayaan, UED-SP.

PENDAHULUAN

Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah salah satu bentuk program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan dan kemakmuran dengan mengusung konsep ‘Tri Daya’ sebagai aspek utama tujuannya yakni, melalui

pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat miskin, pemberdayaan ekonomi produktif dari masyarakat miskin, dan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat miskin. Hal tersebut sejalan dengan prioritas program pembangunan nasional diarahkan pada upaya-upaya pada

penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, merangsang pertumbuhan usaha kecil menengah dan koperasi, penciptaan stabilitas ekonomi dan moneter, peningkatan daya saing dan investasi, penyediaan prasarana untuk mendukung pengembangan ekonomi serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sebagai keseriusan dan wujud nyata dari pelaksanaan program ini, maka pemerintah propinsi Riau melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) propinsi Riau beserta pemerintah kabupaten/kota di propinsi Riau, menggalakkan salah satu Program Pemberdayaan Desa (PPD) melalui Usaha Ekonomi Desa-Simpan-Pinjam (UED-SP), sebagai sebuah lembaga keuangan mikro yang dilaksanakan dan dikelola sendiri oleh dan untuk masyarakat desa/kelurahan.

Kelembagaan masyarakat UED-SP merupakan aspek pendukung pelaksanaan program pemberdayaan pada masyarakat melalui pendekatan akses modal kepada masyarakat golongan menengah ke bawah sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis program yang telah ditentukan. Tujuan utamanya untuk menunjang usaha ekonomi produktif pada masyarakat desa yang bersangkutan. Dengan harapan kedepannya UED-SP merupakan cikal bakal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Program Pemberdayaan Desa (PPD) melalui UED-SP dianggap sebagai pendekatan terbaik dalam menaggulangi kemiskinan, bermuatan upaya pemberdayaan yang lebih luas dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan berfungsi

membentuk kelembagaan masyarakat yang di kelola oleh dan untuk masyarakat dengan menyediakan berbagai jasa keuangan untuk kegiatan ekonomi produktif bagi keluarga miskin.

Walaupun lembaga keuangan mikro formal seperti Bank Perkreditan Rakyat dan sejenisnya telah menawarkan berbagai macam jenis pinjaman, akan tetapi selama ini belum mampu mencapai sasaran yang diharapkan. Hal ini pada umumnya cenderung disebabkan beberapa faktor, seperti misalnya, prosedur yang berbelit-belit, persyaratan administrasi yang sangat sulit dipenuhi oleh masyarakat pedesaan terutama masyarakat miskin (seperti harus menyediakan jaminan/agunan), proses pencairan pinjaman cukup lama, serta jarak tempat pelayanan pinjaman ke lembaga keuangan formal cukup jauh. Akibatnya, pemanfaatan jasa keuangan informal semacam ini dirasakan seperti model pelepas uang, gadai gelap, maupun sistem ijon, yang pada akhirnya sangat memberatkan masyarakat.

Dengan adanya program UED-SP, diharapkan mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat agar dapat hidup mandiri dengan mengembangkan usaha kecil yang merupakan usaha strategis dan potensial dalam menyerap tenaga kerja baru, serta keberpihakan pemerintah terhadap usaha kecil untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan usaha kecil ini dapat berkembang menjadi usaha yang besar sehingga memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam pedoman umum dan petunjuk teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD), seluruh proses kegiatan dalam program pemberdayaan ini pada hakikatnya memiliki tiga dimensi, yaitu:

1. Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab.
2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menyediakan dana usaha desa untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat desa. (Petunjuk Teknis PPD Provinsi Riau, 2009:1).

Adapun tujuan dilaksanakannya Program Pemberdayaan Desa (PPD) secara khusus adalah untuk:

1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa/kelurahan.
2. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah.
3. Meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/kelurahan.
4. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir/menghindarkan masyarakat dari praktek ijon.

5. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan dana usaha desa/kelurahan.
6. Meningkatkan kebiasaan gotong-royong dan gemar menabung secara tertib.
7. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa/kelurahan.

Kegiatannya UED-SP Dharma Bakti berfungsi untuk mendukung usaha ekonomi rakyat terutama bagi masyarakat yang perekonomiannya rendah (kurang mampu). Dalam pelaksanaan kegiatannya UED-SP Dharma Bakti mempunyai 2 (dua) jenis pinjaman yaitu:

1. Pinjaman Usaha Ekonomi Desa (UED)
Pinjaman yang bersifat dana bergulir dengan sumber modal dari Dana Usaha Desa (DUD). Dalam peminjamannya, pemanfaat dikenakan jasa pinjaman sebesar 16.8 % per tahun atau 1.4 % per bulan dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan.
2. Pinjaman Simpan Pinjam (SP)
Pinjaman yang bersifat dana bergulir dengan sumber dana dari simpanan pokok keanggotaan UED-SP Dharma Bakti. Pemanfaat dikenakan jasa pinjaman sebesar 16.8 % per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan.

Dalam kegiatannya, pengelolaan Dana Usaha Desa (DUD) melalui UED-SP merupakan tanggung jawab pengelola, pengurus dan perangkat desa yang ada dengan mengutamakan musyawarah desa dan harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar

Pemberdayaan Desa (PPD) yakni, harus transparan, memihak kepada masyarakat miskin, desentralisasi atau dapat dikerjakan oleh masyarakat, akuntabilitas, kompetisi sehat, termasuk dalam hal usulan, pemilihan pengelola, sistem pengelolaan serta penyaluran dana.

Jenis-jenis usaha yang bisa mendapat pinjaman dalam skala mikro

(1 s/d 30 juta rupiah), yaitu dengan jenis usaha yang dibantu sesuai dengan petunjuk teknis Pemberdayaan Desa (PPD) berupa usaha perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil dan jasa. Berikut kondisi alokasi dana menurut jenis usaha pada UED-SP Dharma Bakti kurun waktu tahun 2007-2015

Tabel 1
Alokasi Peguliran Dana UED Menurut Jenis Usaha

Jenis Usaha	Pemanfaat (Orang)	Rupiah
Perdagangan	64	808.310.000
Pertanian	2	16.000.000
Perkebunan	449	4.994.433.000
Perikanan	0	0
Peternakan	0	0
Industri Kecil	0	0
Jasa	6	49.286.000
Total	521	5.868.029.000

Sumber: Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP-UED) Dharma Bakti, Januari 2015.

Sedangkan untuk jenis usaha Simpan Pinjam (SP), berdasarkan Laporan Perkembangan Pinjaman

(LPP-SP) Dharma Bakti periode 2007-2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2
Alokasi Dana SP Menurut Jenis Usaha

Jenis Usaha	Pemanfaat (Orang)	Rupiah
Perdagangan	15	45.750.000
Pertanian	1	6.500.000
Perkebunan	48	259.821.000
Perikanan	0	0
Peternakan	0	0
Industri Kecil	0	0
Jasa	2	15.500.000
Total	66	327.571.000

Sumber: Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP-SP) Dharma Bakti, Januari 2015.

Berdasarkan Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) UED-SP Dharma Bakti, tercatat selama kurun waktu delapan tahun (2007-2015), lembaga keuangan UED-SP

Dharma Bakti telah mengulirkan dana pinjaman sebanyak 107 kali dengan dana yang bergulir di masyarakat berjumlah 5.8 milyar lebih dengan jenis usaha yang banyak di lakukan

masyarakat pada sektor jenis usaha perkebunan sebanyak 449 pemanfaat.

Dalam kegiatannya, walaupun UED-SP Dharma Bakti telah mengulirkan dana sebesar 5.8 milyar kepada pemanfaat UED-SP, namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi lembaga masyarakat ini (UED-SP Dharma Bakti) yaitu,

berdasarkan laporan UED-SP Dharma Bakti masih terdapat tagihan tunggakan yang harus ditagih kepada pemanfaat sebesar 84 juta rupiah pada pemanfaat pinjaman UED, dan sebesar 10 juta rupiah pada pemanfaat pinjaman SP. Berikut kondisi kolektibilitas pemanfaat UED-SP Dharma Bakti.

Tabel 3
Kolektibilitas Pemanfaat UED-SP Dharma Bakti Tahun 2008-2015

Kolektibilitas	Kriteria	Orang	Saldo Pinjaman	Tunggakan
I (0 bulan)	A	487	535.954.000	0
II (1-2 bulan)	B	9	66.264.000	5.036.889
III (3-4 bulan)	C	14	65.007.000	29.051.944
IV (5-6 bulan)	D	6	26.061.000	16.238.958
V (> 6 bulan)	E	5	73.724.000	33.683.866
Total		521	5.868.029.000	84.011.657

Sumber: Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP-UED) Dharma Bakti, September 2015.

Konsekuensi dari adanya tunggakan berakibat dinilai belum berdayanya kapasitas kelembagaan UED-SP Dharma Bakti sebagai cikal bakal dibentuknya Badan Usaha Milik Desa, sesuai amanat pedoman umum program PPD bahwa harapan UED-SP sebagai cikal bakal terbentuknya BUMDes dalam kurun waktu 5 tahun juga belum terlaksana.

Tantangan lainnya lembaga UED-SP Dharma Bakti dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat (pemanfaat UED-SP Dharma Bakti) yaitu usaha pemanfaat

UED-SP Dharma Bakti masih dihadapkan pada adanya usaha pemanfaat yang belum berkembang dan mengalami penyusutan yang disebabkan berbagai faktor, baik dari pemanfaat UED-SP maupun dari segi pelatihan dan pendampingan yang diberikan pengurus lembaga UED-SP Dharma Bakti untuk menunjang kemampuan pemanfaat UED-SP Dharma Bakti dalam menjalankan usaha ekonomi mikro. Berikut kondisi perkembangan usaha pemanfaat UED-SP Dharma Bakti.

Tabel 4
Perkiraan Kodisi Perkembangan Usaha Pemanfaat UED-SP Dharma Bakti

No.	Pengembalian Dana Dan Pengembangan Usaha	Jumlah Pemanfaat
1	Dana kembali usaha berkembang	167
2	Dana kembali usaha tetap	292
3	Dana kembali usaha bangkrut	30
4	Dana tidak kembali usaha berkembang	-
5	Dana tidak kembali usaha tetap	26
6	Dana tidak kembali usaha bangkrut	6

Total	521
--------------	------------

Sumber: Laporan MDPT UED-SP Dharma Bakti, Januari 2015.

Berdasarkan laporan perkembangan pinjaman UED-SP Dharma Bakti, seperti yang dipaparkan pada tabel-tabel di atas, dan observasi sementara penelitian dapat diidentifikasi bahwa program UED-SP Dharma Bakti masih menghadapi persoalan, seperti; berdasarkan laporan keuangan, UED-SP Dharma Bakti pengelola UED-SP Dharma Bakti masih terdapat tunggakan sebesar Rp. 84 juta rupiah, dengan perilaku peminfaat yang tidak membayar pinjaman maupun pengembalian dana peminfaat yang jatuh tempo (tabel 3), konsekuensinya, memberi berpengaruh dalam penguliran dana UED-SP kepada peminfaat selanjutnya, dan penguatan kapasitas lembaga UED-SP tersebut sendiri dalam mencapai tujuannya (BUMDes). Berdasarkan Laporan Musyawarah Desa UED-SP Dharma Bakti, September 2015 (tabel 4), sekitar 32 peminfaat UED-SP dalam menjalankan usaha tidak berkembang atau bangkrut. Kondisi tersebut salah satu dapat disebabkan tidak

HASIL

A. Program Pemberdayaan Desa, UED-SP Dharma Bakti.

Ketika kebijakan pemerintah tersebut telah dijalankan dan diarahkan sedemikian rupa guna menanggulangi kemiskinan, maka pertanyaan yang perlu dijawab atau dibahas dalam penelitian ini adalah sejauh manakah program penanggulangan kemiskinan atau usaha pemberdayaan pada Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Dharma Bakti telah dilaksanakan dan bagaimana perkembangannya dimasyarakat sebagai akibat dari

memadainya kemampuan pengelolaan usaha oleh peminfaat ataupun pendampingan usaha yang diberikan tidak memadai.

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan, dengan penentuan informan pada pelaksana program (*purposive sampling*) dan pada peminfaat/masyarakat sesuai informasi yang dibutuhkan (*snowball sampling*). Kemudian observasi untuk melihat dan menganalisa kejadian-kejadian dilapangan, selanjutnya dengan menghubungkan wawancara, data atau dokumen program UED-SP Dharma Bakti sesuai kebutuhan. Penelitian dilakukan dengan menganalisis dan mengelompokkan data sesuai jenis dan bentuknya yang menjadi indikator dan faktor-faktor yang mempengaruhi program pemberdayaan pada UED-SP Dharma Bakti. Kemudian data diolah secara deskriptif kualitatif.

kebijakan itu. Pembahasan dilakukan dengan menganalisa keberdayaan ekonomi peminfaat UED-SP Dharma Bakti serta kapasitas kelembagaan Desa (UED-SP) Dharma Bakti dalam mencapai tujuan program pemberdayaan.

1. Keberdayaan Ekonomi Peminfaat.

Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu aspek yang harus dilakukan dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin. Menurut Hidayat dan Syamsulbahri (2001:31), dalam meningkatkan ekonomi produktif

diukur oleh beberapa indikator yang mudah diintervensi melalui program pemberdayaan, meliputi; ketersediaan modal usaha, keterampilan dan kemampuan pengelolaan usaha, dan teknologi

a. Ketersedian Modal Usaha

Salah satu sumber daya utama dalam sebuah pengembangan ekonomi produktif adalah modal usaha. Sumber dana atau modal usaha merupakan salah satu faktor terpenting untuk menjalankan dan mengembangkan sebuah usaha ekonomi pemanfaat UED-SP atau usaha kecil dan menengah.

b. Keterampilan dan Kemampuan Pengelolaan Usaha

Kemampuan pengelolaan usaha dapat dilihat dari struktur pendapatan, perkembangan usaha pemanfaat setelah menerima program pemberdayaan tersebut. Menurut pemanfaat pendapatan setelah melakukan pinjaman mengalami kenaikan. Pada keterampilan pemanfaat dalam membuat proposal usaha (*technical skill anconceptual skill*) setelah adanya program pemberdayaan berjalan baik atau meningkat. Persepsi Staf Analisis Kredit berkaitan dengan pembuatan proposal usaha pemanfaat.

c. Teknologi

Teknologi dalam penelitian ini meliputi sarana ekonomi, antara lain, kelayakan lembaga permodalan dan kemudahan menjangkau lembaga, ketersediaan atau kelayakan pasar. Berikut persepsi pemanfaat dan pengelola berkaitan dengan teknologi dalam mendorong keberdayaan ekonomi pemanfaat. Teknologi yang dimiliki oleh lembaga dari segi sarana dan prasarana dalam mendukung

kegiatan kelembagaan untuk pemberdayaan pemanfaat sudah memadai. Sedangkan kelayakan pasar sebagai tempat usaha pemanfaat sudah tersedia, hal ini dikarenakan Desa Dharma Bakti terletak pada jalur pasar atau perdagangan dan sarana transportasi yang lancar bagi pemanfaat. Selain itu, hal ini didukung inventaris program UED-SP Dharma Bakti bahwa ketersediaan sarana dalam proses kegiatan pengelola untuk mendorong keberdayaan sebagai alat pendukung pemberdayaan menurut pengelola cukup memadai.

2. Keberdayaan Kelembagaan UED-SP Dharma Bakti

Pemberdayaan kelembagaan desa, dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa, sehingga partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat tumbuh dan berkembang. Kapasitas kelembagaan (*Institutional capacity*), menyangkut bagaimana kemampuan kelembagaan untuk mencapai tujuannya sendiri yang diukur dari lima indikator atau aspek yaitu: Strategi kepemimpinan yang dipakai (*Strategic leadership*), perencanaan program (*program planning*), manajemen dan pelaksanaannya (*management and execution*), alokasi sumber daya yang dimiliki (*resources allocation*), dan hubungan dengan pihak luar (Syahyuti, 2003:86)

a. Kepemimpinan

Kepemimpinan menurut para ahli. D.E Mc. Farland (1978) dalam Danim (2012:55), merupakan suatu proses dimana pimpinan akan memberi perintah atau pengaruh, bimbingan atau proses mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih dan mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan adalah pihak-pihak yang diberikan otoritas dan kewenangan sesuai struktur organisasi untuk mengarahkan, membimbing dan bahkan mengambil keputusan (Amtu, 2011:52). Likert dalam Danim (2012:70), kepemimpinan pengelola UED-SP Dharma Bakti dapat dilihat dari proses komunikasi dan interaksi yang terjadi dalam kegiatan UED-SP.

Komunikasi dan interaksi yang dilakukan sesama pengelola intensitasnya rendah walau terdapat keterbukaan informasi dalam rapat tahunan. Selain itu, hal ini didukung berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada pengurus desa dan pemanfaat terhadap keperluan penelitian peneliti yang mengarahkan kepada staff analisis kredit untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan UED-SP secara keseluruhan.

b. Perencanaan UED-SP

Perencanaan merupakan kegiatan menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan tersebut, Brantas (2009:28). Proses perencanaan dapat diukur dari proses keterbukaan dalam sosialisasi program serta partisipasi peserta dalam rapat untuk melakukan evaluasi kegiatan dan penetapan tujuan selanjutnya.

Berdasarkan tata tertib pelaksanaan Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban Tahunan (MDPT) atau (AD/ART) UED-SP Dharma Bakti dalam Pasal 3 bahwa peserta rapat anggota tahunan adalah:

1. Anggota UED-SP Dharma Bakti yang telah mempunyai simpanan pokok
2. Pengelola UED-SP Dharma Bakti dan pelaksana program

3. Undangan
 - a. Camat
 - b. Kepala Desa Dharma Bakti
 - c. Ketua BPD dan Anggota BPD Desa Dharma Bakti
 - d. Ketua LPM dan Anggota
 - e. Tokoh Masyarakat Desa Dharma Bakti
 - f. Undangan lainnya.
4. Pengunjung tidak aktif, yakni masyarakat yang belum menjadi anggota UED-SP.

Persepsi pengelola pada wawancara diatas menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mendorong program pemberdayaan dalam perencanaan kegiatan masih rendah, atau partisipasi khususnya pemanfaat UED-SP belum optimal. Keterbukaan sosialisai mengenai UED-SP sudah diketahui masyarakat, walaupun ada pemanfaat yang mengetahui tidak langsung dari sosialisai yang dilakukan pelaksana program pemberdayaan desa.

c. Manajemen Pelaksanaan

UED-SP Dharma Bakti desa Gabung Makmur juga memiliki sistem manajemen dan struktur organisasi yang mengacu pada standarisasi manajemen koperasi. Standar hukum masih berdasarkan pada Surat Keputusan Desa yang disahkan oleh Bupati, karena modal awal UED-SP ini di anggarkan dari APBD Kabupaten Siak dengan harapan ke depannya menjadi dana abadi desa dan bisa berkembang, bergulir di masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. UED-SP Dharma Bakti juga memiliki AD/ART yang merupakan dasar dan landasan operasional kegiatan pengelolaan. Didalamnya juga di cantumkan tugas dan tanggung

jawab serta hal-hal yang berkaitan dengan proses UED-SP.

Tabel 5
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)
UED-SP Dharma Bakti Tahun 2016

No	Jenis Pengeluaran	Satuan	Harga (Rp.)	Jumlah Satuan	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Belanja				
	A. Gaji / Intensif *				
	1. Pengelola				
	- Ketua	Rp / bln	2.000.000	Rp / thn	24.000.000
	- Kasir	Rp / bln	1.750.000	Rp / thn	21.000.000
	- T U	Rp / bln	1.750.000	Rp / thn	21.000.000
	2. Komisaris	Rp / bln	700.000	Rp / thn	8.400.000
	3. Pengawas	Rp / bln	600.000	Rp / thn	7.200.000
	4. Tim verivikasi	Rp / bln	1.500.000	Rp / thn	18.000.000
	B. Inventaris Kantor				
	C. Adm Kantor	Rp / 12bln		Rp / thn	5.000.000
	D. Perjalanan Dinas	Rp / bln	1.500.000	Rp / thn	18.000.000
	E. Biaya	Rp / bln	200.000	Rp / thn	2.400.000
	Perlengkapan	Rp / bln	200.000	Rp / thn	2.400.000
	F. Biaya Operasional	Rp / bln	100.000	Rp / thn	1.200.000
	Jumlah Pengeluaran	Rp / bln	10.300.000	Rp / thn	128.600.000
2.	Pendapatan **				
	1 Unit Simpan Pinjam	Rp / bln	1.500.000	Rp / thn	18.000.000
	1 Unit UED – SP	Rp / bln	15.000.000	Rp / thn	180.000.000
	Provisi	Rp / bln	500.000	Rp / thn	6.000.000
	Target Pendapatan	Rp / bln	17.000.000	Rp / thn	204.000.000
3.	Perkiraan SHU Tahun 2016		6.700.000		75.400.000

Ket:

* Gaji Intensif bulanan adalah relatif akan disesuaikan dengan realisasi pengembalian kredit (jasa) setiap bulan.

** Pendapatan ini akan tercapai bila pengembangan pinjaman menembus angka Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pengembalian lancar dan tidak ada tunggakan.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) UED-SP Dharma Bakti dapat tercapai apabila masyarakat menyelesaikan tunggakanya dan mempunyai kesadaran serta berperan serta dalam mensukseskan rencana kerja dan program. Selain itu pengawasan dan kerja keras pelaku

PPD yang terlibat dalam kepengurusan UED–SP, aparat pemerintahan kampung, dan instansi terkait lainnya sangat diharapkan demi kemajuan, kelestarian program ke depan

d. Alokasi Sumber Daya

Alokasi sumber daya yang dimaksudkan adalah sejauh mana dana

yang digulirkan organisasi atau lembaga mencapai tujuannya. Keberhasilan alokasi Dana UED-SP dapat dilihat perkembangan sumber

modal, pengalokasian, dan tingkat pengembalian pinjaman/kredit oleh pemanfaat UED-SP.

Tabel 6
Kondisi Sumber Modal UED-SP Dharma Bakti

Jenis	Jumlah (Rp)	Keterangan
DUD (Dana Usaha Desa)	500.000.000	Dana APBD Kabupaten
Modal dari laba Th. 2008	18.675.870	Laba tahun 2008
Modal dari laba Th. 2009	35.947.516	Laba tahun 2009
Modal dari laba Th. 2010	7.100.000	Laba tahun 2010
Modal dari laba Th. 2011	32.372.153	Laba tahun 2011
Modal dari laba Th. 2012	29.783.897	Laba tahun 2012
Modal dari laba Th. 2013	39.796.533	Laba tahun 2013
Modal dari laba Th. 2014	32.986.876	Laba tahun 2014
Modal dari laba Th. 2015	33.781.216	Laba tahun 2015
Simpanan Pokok	12.900.000	537 Anggota
Jumlah	743.344.061	

Sumber: MDPT UED-SP Dharma Bakti, Tutup Buku Tahun 2015.

Pengalokasian Modal

Modal yang diperoleh UED-SP dari DUD ini disalurkan keanggota berdasarkan perjanjian dengan Otoritas DUD bahwa UED-SP akan memberikan bunga (jasa) untuk anggota yang menjadi pemanfaat dibebankan bunga (jasa) 16,8%

pertahun atau 1,4% perbulan. Serta mendapatkan pembagian SHU akhir tahun untuk setiap pemanfaat sesuai dengan keaktifan mereka menjadi anggota. Keuntungan jasa ini telah dirincikan seperti yang tertuang di AD/ART.

Tabel 7
Alokasi Laba/Sisa Hasil Usaha UED-SP Dharma Bakti, Tahun 2015

Alokasi SHU	Persentase (%)	Jumlah Dana
Cadangan Modal	40	33.781.216
APBDes	10	8.445.304
Hibah SP	5	4.222.652
Dana Sosial	8	6.756.243
Bagian anggota + Doorprice	17	14.357.017
Bonus Pelaku	10	8.445.304
Diklat Kursus	3	2.533.591
Biaya MDPT	7	5.911.713
Total SHU	100 %	84.453.039

Sumber : MDPT UED-SP, Januari 2016

Alokasi dana dilihat dari kapasitas lembaga dalam keberdayaan masyarakat pada masyarakat yang

dilayani atau dana lembaga yang diserap oleh masyarakat dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini.

Keberlanjutan kapasitas lembaga dalam peguliran dana salah satu ditentukan oleh faktor pengembalian dana oleh pemanfaat UED-SP dengan bunga pinjaman sebesar 16,8% pertahunnya. Dana yang diterima tersebut kemudian dialokasikan sesuai

dengan petunjuk teknis program antara lain, kembali kepemanfaat yang mengajukan pinjaman, gaji pengelola, dan ke dana usaha desa. Berikut dokumen laporan tingkat keuntungan/pendapatan lembaga dan alokasi

Tabel 9
Tingkat Laba (Keuntungan) UED-SP Dharma Bakti

Uraian	Tahun			
	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
Jasa pinjaman	107.234.900	120,767,600	100,957,000	99,940,000
Bunga	361.924	198,503	576,549	220,541
Denda	6.000	429,510	-	-
Lain-lain	317.000	808,300	-	-
Total	107.919.824	122.203.913	101.533.549	100,160,541

Sumber: Dokumen UED-SP Dharma Bakti, Januari 2015

Tabel 10
Alokasi Pengeluaran UED-SP Dharma Bakti

Uraian	Tahun			
	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	Per Juni 2015 (Rp)
Insentif pengelola	43.439.000	55.914.000	49.379.000	46.604.000
Adm dan umum	2.899.700	2.355.000	2.052.000	2.884.000
Transport	750.000	1.150.000	2.930.000	1.350.000
Sewa Kantor	-	-	-	-
Penyusutan	1.701.389	2.041.668	2.041,668	1.190.973
Lain-lain	520.000	1.410.000	1.753.000	2.964.000
Adm dan pajak Bank	184.045	158.001	140.543	95.847
Total	49.494.134	63.028.669	58.296.211	55.088.820
Laba	58.425.690	59.175.244	43.237.338	45.071.721

Sumber: Dokumen UED-SP Dharma Bakti, Juni 2015

Berdasarkan tabel 9 dan tabel 10 dapat digambarkan bahwa kemampuan kapasitas lembaga dalam alokasi dana dalam mencapai tujuan secara keseluruhan berada pada cukup baik, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan jumlah usaha yang dilayani relatif

mengalami kenaikan pada peningkatan jumlah modal usaha setelah menerima program PPD. Selain itu jumlah masyarakat yang dilayani dari jumlah dana yang diserap termasuk kategori tinggi.

e. Hubungan dengan Pihak Luar

Upaya-upaya yang dilakukan organisasi dalam mendorong keberlanjutan perkembangan dalam mendorong keberdayaan terhadap partisipasi pemanfaat dan usahanya dapat dilihat dari jaringan kerjasama yang terbentuk dengan pihak luar. Berikut gambaran wawancara peneliti berkaitan dengan hubungan lembaga UED-SP Dharma Bakti dengan pihak luar.

Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan pihak luar dari lembaga masih rendah. Hal ini disebabkan kurangnya interaksi pengelola. Selain itu, berdasarkan observasi penelitian bahwa pertemuan antara pengelola dan pelaku Program Pemberdayaan Masyarakat sangat jarang dilakukan, dan apabila dilakukan itu pun dalam rangka Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan (MDPT) yang juga relatif terbatas pada aparat pemerintah di tingkat desa..

B. Faktor-Faktor Mempengaruhi Program Pemberdayaan, UED-SP Dharma Bakti

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi yaitu faktor SDM pemanfaat yang mempengaruhi manajemen pelaksanaan kegiatan UED-SP. Sedangkan sosial ekonomi pemanfaat sangat berpengaruh terhadap pengembalian dan penggunaan modal UED-SP Dharma Bakti. Begitu pula dengan kondisi pembangunan infrastruktur desa dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat sebagai mayoritas petani sawit yang ikut mempengaruhi tanpa adanya pelatihan bagi usaha atau penggunaan dana pinjaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan peneliti tentang analisa perkembangan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam di Kecamatan Pasir Penyu (studi kasus Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam/UED-SP Dharma Bakti) adalah sebagai berikut :

1. Keberdayaan ekonomi pemanfaat setelah mendapat program (UED-SP) dari profil usaha, ketersediaan modal, teknologi dan keuntungan usaha mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini mengindikasikan bahwa UED-SP telah mampu memfasilitasi akses modal, teknologi pada kegiatan ekonomi produktif pemanfaat, sehingga mampu memperbaiki proses produksi dengan meningkatnya keuntungan.
2. Keberdayaan lembaga UED-SP Dharma Bakti dilihat dari alokasi Dana masih berada pada kategori sedang, dikarenakan masih lemahnya perencanaan dan pelaksanaan pendistribusian dana sehingga kesesuaian dan ketepatan pengembalian dana ditingkat pemanfaat tergolong cukup besar. Hal tersebut, tentunya akan mengganggu pelaksanaan kegiatan kelembagaan berikutnya.
3. Keberdayaan lembaga UED-SP yang dilihat dari hubungan dengan pihak luar masih berada pada kategori rendah. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kemampuan lembaga UED-SP dalam membentuk jaringan kerja sama dengan pihak luar terutama yang berada di tingkat kecamatan dan Desa.

4. Pada faktor yang mempengaruhi Program pemberdayaan, ditemukan faktor SDM khususnya pada keahlian keuangan sangat mempengaruhi dalam manajemen pelaksanaan kegiatan UED-SP. Sedangkan sosial budaya masyarakat sangat berpengaruh terhadap pengembalian modal UED-SP Dharma Bakti. Hal ini terlihat pada pemanfaat yang menggunakan dana pinjaman UED-SP bukan untuk usahanya tetapi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu pula dengan kultur budaya pemanfaat yang beraneka ragam, adanya persepsi dimasyarakat kalau dana program pemerintah adalah dana hibah dan tidak perlu dikembalikan, untuk itu, diperlukan identifikasi dan sosialisai kejelasan tujuan program yang lebih kepada pemanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amtu, Onisimus. 2011. *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Alfabeta. Bandung.
- Anwar. 2007. *Menejemen Pemberdayaan Perempuan. Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skill*. Alfabeta. Bandung.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta. Bandung.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Edisi pertama. Kencana Preneda Media Group. Jakarta.
- Danim, Sudarwan. 2012. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektifitas Kelompok*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hidayat dan Syamsulbahri. 2001. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Pustaka Quantum. Jakrta.
- Makmur. 2007. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektifitas Organisasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Pasalong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Purnomo. 2004. *Pembaharuan Desa: Mencari Bentuk Penataan Produksi Desa*. Pustaka Jogja Mandiri. Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sutrisno, H.E. 2007. *Budaya Organisasi*. Kencana Pranadamedia Group. Jakarta.
- Syahyuti. 2003. *Bedah Konsep Kelembagaan: Strategi Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian*. Badan Litbang Pertanian. Bogor.
- Widjaja. H.A.W. 2003. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Yasin. 2003. *Masa Depan Agribisnis Riau*. Unri Press. Pekanbaru.
- Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 78 tahun 2009 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk teknis Program Pemberdayaan Desa.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Dharma Bakti Tahun 2010-2015.

Dokumen Program UED-SP Dharma
Bakti